

Membaca Adopsi Standar Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Kuasa dan Pengetahuan Foucault

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.upb.ac.id

Internet Source

5%

2

Resha Saraswati, Jaurino. "PERAN ANALIS KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA PERAN ANALIS KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA", Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi, 2024

Publication

2%

3

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1%

4

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Turnitin Originality Report

<p>Processed on: 06-Apr-2026 12:49 WIB ID: 2923600990 8% Word Count: 4578</p>	<p>Similarity by Source</p> <p>Internet Sources: 5% Publications: 2% Student Papers: 1%</p>
--	--

Submitted: 1

Membaca Adopsi Standar

Pelaporan

Keuangan dalam 5% match (Internet from
Perspektif Kuasa 07-Aug-2024)

dan Pengetahuan

Foucault By

Perpustakaan1

UKDC

<https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jadi/article/view/43>

2% match (Resha Saraswati, Jaurino.
"PERAN ANALIS KREDIT DALAM PEMBERIAN
KREDIT PADA PT. BPR CAHAYA
KHATULISTIWA SEJAHTERA PERAN ANALIS
KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA
PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA
SEJAHTERA", Jurnal Akuntansi, Auditing dan
Investasi, 2024)

[Resha Saraswati, Jaurino. "PERAN ANALIS
KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA
PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA
PERAN ANALIS KREDIT DALAM PEMBERIAN
KREDIT PADA PT. BPR CAHAYA
KHATULISTIWA SEJAHTERA", Jurnal
Akuntansi, Auditing dan Investasi, 2024](#)

< 1% match (student papers from 08-Jun-2016)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2016-06-08](#)

< 1% match (student papers from 29-Jan-2018)

[Submitted to Udayana University on 2018-01-29](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id](#)

[MEMBACA ADOPSI STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF KUASA DAN PENGETAHUAN FOUCAULT](#) Yohanes

Febiyol Halan* Jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika [E-mail : Yohaneshalan01@gmail.com](#) [ABSTRACT](#)

[The](#) adoption [of](#) financial reporting standards is approached in a different way in this research. The objective is to comprehend and clarify the adoption of financial reporting standards from the perspective of the power held by standard-setting bodies. The power they possess is connected to their knowledge. The researcher uses Foucault's power-knowledge relational perspective as the research method. The findings demonstrate a strong connection between power and knowledge when it comes to adopting financial reporting standards. Standard-setting bodies use their knowledge to exert power. Internalizing power in financial reporting standards leads to knowledge. Standard-setters have a non-oppressive and omnipresent power. This research is expected to provide a

novel understanding of the adoption of financial reporting standards from the perspective of power-knowledge relations. Keywords: Financial reporting standards, power-knowledge relations **ABSTRAK**

Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda terkait adopsi standar pelaporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan adopsi standar pelaporan keuangan dari sudut pandang kuasa yang dimiliki oleh badan pembuat standar. Kuasa ini dikaitkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Peneliti menggunakan perspektif relasi kuasa-pengetahuan Foucault sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan kuatnya relasi kuasa-pengetahuan dalam adopsi standar pelaporan keuangan. Badan pembuat standar pelaporan keuangan menggunakan pengetahuannya untuk menghasilkan kuasa. Kuasa yang diinternalisasi dalam standar pelaporan keuangan menghasilkan pengetahuan. Kuasa yang dimiliki oleh pembuat standar adalah kuasa tanpa penindasan. Kuasa ini juga ada dimana-mana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait adopsi standar pelaporan keuangan dari perspektif relasi kuasa-pengetahuan

Kata Kunci: Standar pelaporan keuangan, relasi kuasa-pengetahuan

PENDAHULUAN Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB), standar akuntansi merupakan suatu metode untuk penyeragaman penyajian informasi keuangan. Lebih lanjut FASB menyatakan bahwa standar akuntansi meliputi kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi,

kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum.

Tujuannya adalah agar laporan keuangan dari berbagai perusahaan dapat dibandingkan (Endrawes et al., 2020). Definisi ini secara tegas menganjurkan keseragaman lintas batas mengingat perusahaan multinasional dapat beroperasi pada beberapa negara. Para pihak yang berkepentingan membutuhkan standar yang sama agar dapat memahami dan membandingkan kondisi perusahaan yang berada pada lintas negara. Adopsi standar pelaporan keuangan internasional, selanjutnya disebut standar pelaporan keuangan, dianggap jalan untuk mencapai tujuan ini. Adopsi standar pelaporan keuangan dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses penyeragaman budaya mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Pemaknaan ini memantik pertanyaan lebih lanjut terkait seberapa penting penyeragaman ini, mengingat ada proses memasukan budaya kerja baru dalam masyarakat industri di suatu negara. Argumentasi para pihak yang mendukung proses adopsi standar akuntansi adalah penciptaan harmonisasi global atas rasionalitas ekonomi agar menghasilkan keterbukaan dan tanggung jawab (Lehman, 2005). Pandangan ini mengandaikan adanya kesamaan struktur sosial budaya sehingga dapat secara seragam bereaksi terhadap perubahan yang diberikan. Dengan demikian, pembuat standar akan memodifikasi sedemikian rupa standar pelaporan keuangan agar perubahan dapat diterima tanpa penolakan oleh pihak pengguna. Argumentasi terkait penciptaan

keharmonisan global mendapat tanggapan serius dari pihak yang berseberangan. Mereka memandang bahwa propaganda adopsi standar pelaporan keuangan bukan hanya persoalan laporan keuangan namun juga kental dengan unsur politik (Fogarty, 1992; Zeff, 2012)(Fogarty, 1992). Faktor kepentingan, mempertahankan status quo, bahkan memperluas kekuasaan dalam bidang ekonomi dapat menjadi tujuan dari propaganda ini. Beberapa peneliti lain sudah mencoba menginterpretasikan secara kritis terkait persoalan ini dari sudut pandang negara yang pengadopsi. (Gallhofer et al., 2011)dan (Guerreiro et al., 2012) sepakat menginterpretasikan bahwa adopsi standar pelaporan keuangan dimotivasi oleh keinginan untuk mendapat legitimasi dari negara-negara kuat atau organisasi lintas batas. Legitimasi yang diharapkan seperti yang diinterpretasikan oleh (Gallhofer et al., 2011)dan (Guerreiro et al., 2012) mesti diselidiki lagi lebih mendalam terkait para pihak yang berperan mengambil keputusan. Korporasi adalah salah satu pihak yang berkepentingan dengan penyamaan standar pelaporan keuangan ini. Mereka berkepentingan untuk mendapat legitimasi terkait internasionalisasi untuk menyamakan posisi mereka dengan korporasi di negara lainnya. Penyetaraan ini menjadi penting untuk meningkatkan nilai. Namun perlu diingat bahwa kepentingan korporasi harus didukung oleh negara sebagai pemegang otoritas. (Botzem & Quack, 2006) memberi catatan bahwa standar akuntansi beroperasi dengan cara yang serupa, baik dalam sistem yang diatur secara privat maupun

dalam sistem yang diatur secara publik. Negara pada satu sisi dapat secara tegas memberikan batasan atas masuknya sebuah standar yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya yang dianut. Namun negara juga dapat mempertimbangkan faktor ekonomi berupa investasi yang akan masuk jika adanya penyamaan standar pelaporan keuangan. Pertimbangan terkait pengurangan beban dalam membuat standar sendiri juga dapat digunakan untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan. (Schmitter & Lehmbbruch, 1979) dan (Fligstein et al., 1983) berpendapat bahwa pemberian akses kepada kelompok-kelompok kepentingan dalam membuat kebijakan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah. Badan pembuat standar pelaporan keuangan internasional, selanjutnya disebut badan pembuat standar, adalah badan profesional dalam bidang standar akuntansi keuangan yang juga berkepentingan atas penyamaan standar. (Arnold, 2005) dan (Gallhofer et al., 2011) memberikan catatan penting bahwa firma audit besar adalah aktor kunci dalam kaitannya dengan harmonisasi standar pelaporan keuangan karena mereka yang mengendalikan profesi. Ada tiga pihak yang dapat disebut sebagai yang berkepentingan terhadap adopsi pelaporan keuangan yaitu korporasi, negara, profesional. Kerja sama tiga pihak ini menjadi penting untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian seperti yang diharapkan oleh pihak yang menyetujui penyeragaman standar. Dalam prakteknya, tidak semua negara pengadopsi dapat mengimplementasikan standar internasional secara baik. (Tyrrall et al.,

2007) mencatat bahwa negara yang akibat tekanan untuk mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) tidak dapat menerapkannya secara patuh. Hal ini terjadi karena ada variabel di luar standar yang dapat mempengaruhi akuntansi. Sosial budaya dan ideologi dapat menjadi faktor di luar standar yang mempengaruhi adopsi standar pelaporan keuangan di suatu negara. Kondisi seperti ini menjadi perhatian dari para pihak yang kontra terhadap penyeragaman standar pelaporan keuangan. Perlu dipahami bahwa dalam hubungan antara ketiga pihak di atas, pihak profesional pembuat standar adalah yang berperan penting dalam menghasilkan standar. Standar yang dihasilkan mesti diformulasikan sedemikian rupa agar dapat dipahami dengan cara yang sama oleh semua negara yang mengadopsi. Selain itu, untuk menghindari kesalahan penafsiran yang dapat berakibat pada kesalahan penerapan hingga penolakan, pembuat standar menggunakan istilah-istilah yang tidak multi tafsir dan melengkapinya dengan contoh-contoh yang relevan. Dengan demikian, standar pelaporan yang dihasilkan merupakan dokumen instruksi yang diharapkan akan digunakan secara taat oleh para pengguna tanpa perlawanan yang berarti. Pembuat standar pada posisi ini dapat memaksa negara pengadopsi untuk menggunakan standar tanpa harus berkuasa atas negara pengadopsi. Mereka dapat mengontrol aktivitas keuangan negara pengadopsi menggunakan bahasa pelaporan yang mereka siapkan tanpa harus menguasai negara pengadopsi (Savira et al., 2022). Mereka bisa

melakukan ini karena mereka memiliki pengetahuan dalam menyusun standar pelaporan keuangan. Oleh karena itu maka penting untuk menjelaskan lebih dalam secara konseptual teoretis tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam hubungannya dengan standar pelaporan keuangan. Artikel ini akan menggunakan perspektif kuasa-pengetahuan Foucault untuk menjelaskan adopsi standar pelaporan keuangan. Ada sejumlah penelitian sebelumnya terkait pengadopsian standar pelaporan keuangan. (Lehman, 2005) mengkritik pendekatan modernitas yang terlalu fokus pada keuntungan perusahaan dan tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan global yang dihasilkan oleh harmonisasi akuntansi internasional. (Aburous, 2019) berpendapat bahwa implementasi IFRS telah menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara akuntansi perusahaan dan audit, dengan audit mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan kontrol atas perusahaan. (Cieslewicz, 2014) menyatakan bahwa faktor budaya dan institusional memainkan peran penting dalam membentuk praktik akuntansi di berbagai negara. (Laaksonen, 2022) menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan kekuasaan dalam proses terjemahan dan menunjukkan bahwa terjemahan dapat mengungkapkan ketimpangan dan hegemoni antar budaya. Penelitian oleh (Albu et al., 2014) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti budaya lokal, institusi, dan kepentingan aktor-aktor lokal dapat mempengaruhi penerjemahan dan penerapan standar akuntansi global. Hasil

penelitian di atas memberikan gambaran adanya sejumlah akibat lain yang muncul sebagai konsekuensi logis adopsi standar pelaporan keuangan. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan adopsi standar pelaporan keuangan dari sudut pandang kuasa yang dimiliki oleh badan pembuat standar.

TINJAUAN PUSTAKA Relasi Strategis Kekuasaan sebagai relasi strategis memunculkan enam pokok pikiran seperti yang disarikan oleh (Kebung, 2018) sebagai berikut. Pertama, Kuasa pada dasarnya timbul dari hubungan antara berbagai kekuatan. Kuasa yang mutlak dan a priori, tidak tergantung pada kesadaran manusia. Bukan milik yang dapat diperoleh, dipindahkan, atau diubah, telah ada dalam praktik sebelum dimengerti sebagai kekuasaan antar manusia. Kedua, Kuasa ini tersebar di seluruh tempat dan tidak dapat diidentifikasi lokasinya. Di setiap struktur dan relasi antar manusia, terdapat kuasa yang menentukan aturan internal, tidak bergantung pada sumber eksternal. Ketiga, Kuasa dipahami sebagai mekanisme atau strategi yang menekankan fungsi dalam bidang tertentu. Kuasa diimplementasikan dalam posisi yang saling terhubung secara strategis, membawa potensi strategi perjuangan tanpa tumpang tindih atau kekacauan. Keempat, Kuasa dan pengetahuan saling terkait secara erat dalam interaksi kompleks dan saling mempengaruhi. Pengetahuan lahir dari relasi kuasa, sementara kuasa juga dapat dianggap sebagai bentuk pengetahuan. Keduanya saling terkait. Kelima, Bentuk kuasa umumnya berasal dari tingkat bawah

masyarakat dan pada dasarnya tidak bersifat represif. Meskipun unsur-unsur ini hadir dalam hubungan antarmanusia, hakikat kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa beroperasi melalui regulasi dan normalisasi. Keenam, Di setiap keberadaan kuasa, selalu timbul resistensi. Resistensi dalam relasi kuasa menurut Foucault tidak selalu sebagai posisi eksterior, melainkan sebagai reaksi dengan nuansa kebebasan dan saling menerima. Episteme Foucault awalnya memfokuskan perhatiannya pada sejarah pengetahuan, terutama epistem. Epistem merupakan pengetahuan yang sudah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman. Epistem dipahami dalam rana yang praktis. Melalui episteme, kita dapat memahami cara strategi kekuasaan beroperasi dalam domain pengetahuan. Foucault mengungkap mitos pengetahuan melalui dua pendekatan, yaitu metode arkeologi dan genealogi. Foucault mengartikan arkeologi sebagai penyelidikan kondisi sejarah konkret, di mana pernyataan digabungkan membentuk dan mendefinisikan bidang pengetahuan terpisah, memerlukan seperangkat konsep tertentu. Arkeologi, menurut Foucault, menyoroti peninggalan masa lalu di lokasi tertentu dan menelusuri jejak ritus atau monumen diskursif. Terkait genealogi, Foucault tidak bermaksud menggunakannya untuk menelusuri asal-usul, dan tidak berniat untuk kembali ke masa lalu untuk mengisi kelanjutan yang tak pernah berakhir. Foucault berusaha menyelami setiap tema dalam setiap periode, menggunakan tema tersebut

sebagai alat analisis terhadap sistem pengetahuan yang dihasilkan oleh berbagai wacana praktis pada waktu itu (Flew, 2015). (Kendall & Wickham, 2011) menyarankan ada lima tahap kunci dalam menerapkan paradigma Foucauldian, termasuk: memahami bahwa wacana adalah kumpulan pernyataan yang diorganisir secara teratur dan sistematis dalam korpus linguistik; mengenali norma-norma yang menghasilkan pengetahuan; Mencari aturan-aturan yang menetapkan pembatasan-pembatasan; mencari aturan-aturan yang memberikan peluang bagi kemunculan pengetahuan yang baru; mencari norma-norma yang memastikan bahwa praktik pengetahuan bersifat baik material maupun diskursif secara simultan. Governmentality Foucault menggambarkan governmentality sebagai serangkaian praktik yang memungkinkan seseorang untuk membentuk, mendefinisikan, mengorganisir dan menginstrumentalkan strategi-strategi yang digunakan oleh individu dalam interaksi satu sama lain. (McKinlay & Pezet, 2018). Ini menunjukkan bahwa konsep governmentality tidak hanya berlaku untuk negara, tetapi juga mencakup semua institusi yang mengatur kehidupan sosial, termasuk perusahaan. Governmentality memiliki tiga prinsip (McKinlay & Pezet, 2018). Pertama, prinsip dasar governmentality adalah strategi yang memberikan solusi pragmatis untuk masalah tertentu, meskipun masalah tersebut sulit diatasi. Kedua, Strategi yang dianggap sah adalah strategi yang dapat dipertanggungjawabkan karena berkontribusi pada perluasan kebebasan

individu. Ketiga, Karakteristik unik dari strategi- strategi tersebut adalah kemampuan mereka untuk menetapkan, mengawasi, dan menilai suatu populasi dengan tujuan mengidentifikasi serta mengincar individu-individu tertentu untuk diintervensi. Governmentality menekankan pengelolaan perilaku dari jauh atau tanpa intervensi langsung. Seni memerintah tidak terikat pada lingkup negara, melainkan dapat ditemukan di berbagai tempat di mana kekuasaan berusaha mengelola perilaku, walaupun melibatkan cara yang tidak langsung (Thompson, 2003). (Lash, 2007) membahasakan governmentality sebagai cara Foucault menjelaskan post-hegemonik. Pergeseran kekuasaan dari hegemonik ke post-hegemonik melibatkan perubahan dari rezim epistemologis ke model ontologis, dari kekuasaan terhadap (power over) ke kekuasaan dari dalam (power from within). Foucault mengutamakan penggunaan analisis diskursus untuk menemukan dan memahami kekuasaan yang terselubung di dalam konstruksi pengetahuan (Bisman, 2011; Carnegie, 2014)(Carnegie, 2014).

METODE PENELITIAN Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dengan teknik studi literatur sesuai realitas sosial yang terjadi. Fokus utama dalam artikel ini adalah mengenai keterkaitan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam kaitannya dengan adopsi standar pelaporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggali pemikiran para ahli, yang ide-ide mereka terdokumentasikan dalam berbagai buku, artikel, dokumen, dan sumber lainnya,

terutama terkait dengan penerapan standar pelaporan keuangan dilihat dari perspektif kekuasaan dan pengetahuan. Peneliti menggunakan pokok pemikiran Foucault tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan sebagai teknik analisis data. Foucault meneliti hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang pada akhirnya menjadi inti dari teorinya. Foucault memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang berbeda dari perspektif Marxian atau Weberian. Baginya, kekuasaan bukan kepemilikan, melainkan hubungan kompleks dan terdistribusi dalam masyarakat. Kekuasaan bukanlah sekadar mekanisme dominasi yang termanifestasi dalam relasi konvensional antara yang mendominasi dan yang didominasi, atau antara yang berkuasa dan yang tanpa kekuasaan. (Sukoharsono & Gaffikin, 1993) menjelaskan bahwa menerapkan pendekatan filosofis Foucauldian dalam penelitian sejarah akuntansi disebut sebagai paradigma postmodern, di mana studi sejarah akuntansi dilakukan dengan menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Michael Foucault. Pada dasarnya ada dua paradigma utama yang digunakan dalam penelitian terkait akuntansi (Carmona et al., 2004) yaitu traditional accounting history dan new accounting history. Paradigma pertama merupakan paradigma mainstream dalam studi akuntansi. Sedangkan paradigma kedua adalah pendekatan alternatif. **HASIL DAN PEMBAHASAN [Adopsi Standar Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Kuasa Dan Pengetahuan Foucault](#)** Argumentasi utama pentingnya standar akuntansi internasional

adalah penerapan prinsip rasionalitas ekonomi yang bertujuan mencapai harmonisasi global, menciptakan peluang finansial dan politik yang saling menguntungkan dalam konteks tatanan dunia terbuka. Argumentasi ini seperti memberi harapan baru akan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh politik mulia yang dapat diperoleh dari adopsi standar pelaporan keuangan. Pihak yang mendukung cara pandang ini melihat tidak terhindarnya globalisasi. Globalisasi berdampak pada guncangan ekonomi, maka dibutuhkan alat yang menyeimbangkan yaitu pasar dengan hambatan minimal. Standar pelaporan keuangan yang berlaku global menjadi alat yang dapat menyeimbangkan pasar. Argumentasi ini seperti menciptakan masalah dan mencari solusi atas masalah yang mereka buat. Istilah globalisasi diciptakan secara sebagai sebuah peluang dan sekaligus masalah. Pada saat bersamaan mereka menghadirkan standar pelaporan keuangan sebagai cara untuk menangkap peluang sekaligus memitigasi masalah. Argumentasi ini mendefinisikan permasalahan sebagai sesuatu yang berlaku global sekaligus memberikan solusi global. Hal ini serentak menutup potensi lokal untuk menyelesaikan persoalan mereka. Argumentasi standar pelaporan keuangan sebagai alat menciptakan kesejahteraan, menimbulkan pertanyaan terkait pihak-pihak mana yang akan memperoleh kesejahteraan. Jika standar pelaporan lokal keuangan dari sebuah negara diabaikan maka akan sangat sulit memaknai bahwa kesejahteraan akan diperoleh oleh masyarakat lokal melalui

standar pelaporan yang dibuat oleh badan internasional. Situasi awal tahun 1980-an berperan penting dalam munculnya Foucault sebagai sumber utama dalam sejarah akuntansi kritis (Carter, 2008). Terhadap akuntansi, studi Foucauldian berpendapat bahwa teknik akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat, melainkan juga membentuk cara pandang terhadap dunia, khususnya dalam penghitungan individu dan perilaku tertentu (McKinlay & Pezet, 2010). Hal ini memberikan gambaran bahwa akuntansi dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol. Untuk menjadikan akuntansi sebagai alat, perlu adanya standar yang memaksa pihak lain untuk patuh. Para pembuat standar adalah pihak yang paling berkepentingan dalam memaksakan pihak lain. Kondisi ini memenuhi definisi kekuasaan dan pengetahuan Foucault. Akuntansi merupakan sebuah konsep yang dibakukan dalam sebuah standar. Standar mengandung pernyataan-pernyataan yang diorganisasikan secara teratur dan sistematis. Hal ini dimungkinkan karena akuntansi mempunyai sifat-sifat dasar seperti Accounting Entity, Going Concern, Measurement, Time Period, Monetary Unit, Accrual, Exchange Price, Measurement, Approximation, Judgment, General Purpose, Interrelated Statement, Substance Over Form, Materiality. Berdasarkan pada sifat dasar ini maka akuntansi dapat dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan tentang akuntansi mulai dibangun dengan menyusun kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam menghasilkan setiap

butir standar. Kerangka konseptual merupakan sistem koheren yang menghubungkan tujuan dan prinsip, memandu pembentukan standar konsisten, menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan serta laporan keuangan. Setiap standar yang dihasilkan secara tegas memberikan batasan-batasan. Batasan-batasan ini jelas ada dalam struktur penulisan standar yang dimulai dengan menjelaskan tujuan, menjelaskan ruang lingkup, dan memberikan definisi-definisi sebelum masuk pada penjelasan pokok. Setiap standar merupakan aturan-aturan yang membuka ruang bagi pengetahuan baru. Standar akuntansi selain berupa aturan-aturan yang dibangun untuk menjelaskan sebuah konsep, juga sekaligus merupakan konsep baru. Hal ini berarti bahwa standar akuntansi itu adalah bentuk praktis dari konsep dan sekaligus dapat menghasilkan interpretasi baru yang aturan tersebut. Dengan kata lain standar akuntansi merupakan aturan-aturan yang menjamin bahwa praktik pengetahuan bersifat material dan diskursif secara bersamaan. Mendesentralisasikan analisis kekuasaan dan menolak model pemusatan kekuasaan Kuasa menurut Foucault tersebar di seluruh tempat. Ketika sebuah perusahaan mengadopsi standar pelaporan keuangan maka pada saat bersamaan mereka berada dalam kuasa pembuat standar. Kuasa yang dimiliki oleh pembuat standar ada di mana-mana dan siap untuk menguasai siapa saja yang menggunakan standar pelaporan keuangan. Foucault menjelaskan bahwa kuasa dapat bekerja pada tubuh yang patuh. Tubuh yang patuh ini

ditundukan, ditransformasi agar kuasa dapat bekerja. Pada kasus penyeragaman standar pelaporan keuangan, pembuat standar pelaporan keuangan mengkondisikan semua negara pengadopsi sedemikian rupa agar dapat mengimplementasikan standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga mencapai kondisi optimal. Fokus utama Foucault pada proses ini bukan pada hasilnya tapi pada prosesnya. Hal ini terjadi pada proses adopsi IFRS seperti yang terjadi di Indonesia. Dilakukan dalam beberapa tahapan sambil mempersiapkan infrastrukturnya. Proses yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara pengadopsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa itu dapat terjadi secara bersamaan di beberapa tempat sekaligus. Ini yang disebut sebagai kekuasaan yang terdesentralisasi. Melihat kekuasaan secara eksternal. Kekuasaan dalam pandangan Foucault harus dilihat dari sumber kekuasaan itu muncul. Pada kasus adopsi standar pelaporan keuangan, kekuasaan tidak datang dalam bentuk kekuatan namun dalam bentuk gagasan. Maka perlu untuk memahami bagaimana cara kerja lembaga pembuat standar pelaporan keuangan. Lembaga ini tidak mempunyai lokasi teritorial seperti sebuah negara. Kekuasaan bukanlah sovereign power tetapi disciplinary power. Maka lokasi kekuasaan bukan berupa tempat tapi berupa hubungan yang terafiliasi antara lembaga pembuat standar dan pengadopsi standar pelaporan keuangan. Kekuasaan bukan sebagai komoditas. Foucault melihat kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan (forces).

Dalam kaitannya dengan standar pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa terbentuknya International Accounting Standards Committee (IASC) yang kemudian menjadi The International Accounting Standards Board (IASB) merupakan hasil relasi pihak-pihak yang berkepentingan. Berkembangnya perdagangan internasional dan investasi lintas batas mendorong pihak-pihak berkepentingan untuk merumuskan sebuah standar yang dapat dipahami bersama. Standar merupakan alat untuk untuk mengatur perilaku berdasarkan definisi yang dituliskan dalam standar tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan yang tegas sekaligus menyamakan persepsi sehingga mengurangi interpretasi kontraproduktif. Kekuasaan bekerja dari bawah ke atas. Kekuasaan dimulai dari konsepsi atau gagasan yang berasal dari situasi yang berskala kecil, dan kemudian berkembang menjadi keputusan dan tindakan yang lebih besar. Kekuasaan dalam pengertian ini tidak dipaksakan oleh otoritas seperti negara. Kekuasaan dalam kaitannya dengan adopsi standar pelaporan keuangan, ide pembuatan standar muncul dari kalangan profesional dalam usaha untuk mengakomodir kepentingan pemilik modal. Ide ini ditangkap oleh pihak-pihak berkepentingan dan dalam perkembangannya dibutuhkan peran negara. Kesepakatan dalam pertemuan negara-negara G-20 adalah bukti nyata perubahan bentuk ide dari bawah menjadi kekuasaan. Kekuasaan dimulai dari mekanisme dan praktik-praktik, bukan ideologi IASB sebagai badan yang

menghasilkan IFRS. Pengetahuan yang mereka miliki dapat mewajibkan pengadopsi menjalankan standar yang dibuat. Pengetahuan terbentuk melalui pengaruh kuasa, sementara pengetahuan itu sendiri menjadi sumber dari kuasa. Standar pelaporan keuangan merupakan sumber pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh pembuat standar memproduksi kuasa melalui standar. Pengetahuan ini bukan merupakan suatu ilmu yang berguna bagi masyarakat banyak tetapi merupakan bentuk otoritatif. Bentuknya yang otoritatif mengubah perilaku para pengadopsi standar pelaporan keuangan sesuai dengan keinginan pembuat standar. Kekuasaan ini tidak dalam pengertian represif. Kekuasaan ini dipandang sebagai sesuatu yang natural karena tidak ada penindasan dalam menggunakan IFRS. Negara-negara pengadopsi melihat standar pelaporan keuangan sebagai suatu kebutuhan sehingga perlu untuk segera dilakukan. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia. Sebagai tanggapan atas kesepakatan negara-negara G-20 pada tahun 2009, lembaga pembuat standar secara bertahap melakukan penyesuaian pada standar lokal menuju IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terjadinya normalisasi untuk menerima standar internasional sebagai suatu kebenaran. Pada saat bersamaan negara pengadopsi menjadi objek yang dikuasai oleh lembaga pembuat standar pelaporan keuangan. Pengetahuan yang ditawarkan oleh pembuat standar pelaporan keuangan adalah pengetahuan yang dalam istilahnya Foucault disebut epistem. Pengetahuan dalam konteks ini

sudah tidak dipahami sebagai sesuatu yang benar atau salah. Pengetahuan ini dipahami dari sudut pandang kepraktisan yaitu apakah dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Lembaga pembuat standar berhak membuat standar berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka anggap benar dalam pengertian dapat diterapkan di semua negara pengadopsi. Oleh karena itu maka kebenaran dalam standar pelaporan keuangan merupakan hasil dari relasi kekuasaan yang terinternalisasi dalam diri pembuat standar. Kebenaran dalam standar pelaporan keuangan adalah kebenaran yang akan berubah ketika terjadi perubahan kepentingan para pihak terkait. PENUTUP Akuntansi pada dasarnya adalah alat untuk menguasai sebagaimana Foucault mendefinisikan kekuasaan. Dalam perkembangan sejarahnya pun akuntansi menjadi alat menguasai. Ketika akuntansi diatur secara ketat dalam sebuah standar, peran akuntansi sebagai alat kekuasaan menjadi sangat jelas. Maka ketika ketika akuntansi digunakan dengan cara yang sama oleh pengguna, wilayah kekuasaan akuntansi menggapai sampai ke penjuru dunia. Namun, adopsi standar pelaporan keuangan yang didasarkan pada pemikiran bahwa dibutuhkan keseragaman dalam dunia global untuk menciptakan keuntungan bagi semua pihak mendapat tanggapan beragam. (Aburous, 2019) memberikan dua asumsi dasar akuntansi. Pertama, Akuntansi adalah bentuk institusi, suatu sistem pemikiran, dan rutinitas organisasional yang melibatkan aktor dan kekuasaan. Kedua, Akuntansi perusahaan dianggap sebagai suatu ranah

institusional yang memiliki sistem pengetahuan khusus, peran-peran yang terdefinisi, dan keyakinan bersama. Asumsi dasar ini memberikan pemahaman bahwa akuntansi merupakan bentuk kekuasaan yang digunakan oleh para aktor di dalamnya. Maka penyamaan standar pelaporan keuangan merupakan kemauan para aktor yang hendak berkuasa. Lembaga pembuat standar memproduksi kekuasaan melalui standar yang dihasilkan dan menawarkan kepada kepada pengadopsi sebagai 'solusi' menciptakan kesejahteraan bersama. Menggunakan pengetahuan, mereka menciptakan kekuasaan. Pada saat bersamaan melalui kekuasaan mereka menciptakan pengetahuan berupa standar baru pelaporan keuangan. Melalui standar pelaporan keuangan mereka berperan seperti kamera pengawas. Kekuasaan yang diproduksi oleh lembaga pembuat standar pelaporan keuangan tidak represif sehingga tidak menimbulkan resistensi yang berarti. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa relasi kuasa-pengetahuan yang diperankan oleh lembaga pembuat standar pelaporan keuangan ini akan terus berjalan sampai ditemukan relasi kuasa pengetahuan baru yang dapat membatalkan relasi kuasa pengetahuan yang sedang berjalan ini. Kelima terakhir ini mau mengatakan bahwa relasi kuasa-pengetahuan tidak akan hilang namun hanya berganti bentuk.

DAFTAR PUSTAKA
Aburous, D. (2019). IFRS and institutional work in the accounting domain. *Critical Perspectives on Accounting*, 62.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.10.001>
Albu, C. N., Albu, N., & Alexander, D.

(2014). When global accounting standards meet the local context-Insights from an emerging economy. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(6).

<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.005>

Arnold, P. J. (2005). Disciplining domestic regulation: The World Trade Organization and the market for professional services. *Accounting, Organizations and Society*, 30(4).

<https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.04.001>

Bisman, J. (2011). Old fossils and accounting history. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 24(7).

<https://doi.org/10.1108/09513571111161657>

Botzem, S., & Quack, S. (2006). Contested rules and shifting boundaries: International standard-setting in accounting. In *Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation*.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511488665.014>

Carmona, S., Ezzamel, M., & Gutiérrez, F. (2004). Accounting history research: traditional and new accounting history perspectives. *De Computis*, 1. Carnegie, G. D. (2014). The present and future of accounting history. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 27(8).

<https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2014-1715> Carter, C. (2008). A Curiously British Story: Foucault Goes to Business School. *International Studies of Management & Organization*, 38(1).

<https://doi.org/10.2753/imo0020-8825380101> Cieslewicz, J. K. (2014). Relationships between national economic culture, institutions, and accounting: Implications for IFRS. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(6).

<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.006>

Relationships between national economic culture, institutions, and accounting: Implications for IFRS. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(6).

<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.006>

Endrawes, M., Feng, Z., Lu, M., & Shan, Y. (2020). Audit committee characteristics and financial statement comparability. *Accounting and Finance*, 60(3). <https://doi.org/10.1111/acfi.12354>

Flew, T. (2015). Foucault, Weber, Neoliberalism and the Politics of Governmentality. *Theory, Culture & Society*, 32(8). <https://doi.org/10.1177/0263276415607605>

Fligstein, N., Lehmbruch, G., & Schmitter, P. C. (1983). Patterns of Corporatist Policy-Making. *Contemporary Sociology*, 12(5). <https://doi.org/10.2307/2068745>

Fogarty, T. J. (1992). Financial accounting standard setting as an institutionalized action field: Constraints, opportunities and dilemmas. *Journal of Accounting and Public Policy*, 11(4). [https://doi.org/10.1016/0278-4254\(92\)90003-G](https://doi.org/10.1016/0278-4254(92)90003-G)

Gallhofer, S., Haslam, J., & Kamla, R. (2011). The accountancy profession and the ambiguities of globalisation in a post-colonial, Middle Eastern and Islamic context: Perceptions of accountants in Syria. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(4). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.09.003>

Guerreiro, M. S., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2012). Voluntary adoption of International Financial Reporting Standards by large unlisted companies in Portugal - Institutional logics and strategic responses. *Accounting, Organizations and Society*, 37(7). <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.05.003>

Kebung, K. (2018). Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia. *MELINTAS*, 33(1). <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>

Kendall, G., & Wickham, G. (2011). Using Foucault's Methods. In *Using*

Foucault's Methods.

<https://doi.org/10.4135/9780857020239>

Laaksonen, J. (2022). Translation, hegemony and accounting: A critical research framework with an illustration from the IFRS context. *Critical Perspectives on Accounting*, 89.

<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102352>

Lash, S. (2007). Power after Hegemony: Cultural Studies in Mutation? *Theory, Culture & Society*, 24(3).

<https://doi.org/10.1177/0263276407075956>

Lehman, G. (2005). A critical perspective on the harmonisation of accounting in a globalising world. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(7).

<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.06.004>

McKinlay, A., & Pezet, E. (2010).

Accounting for Foucault. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(6).

<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.08.006>

McKinlay, A., & Pezet, E. (2018). Foucault, governmentality, strategy: From the ear of the sovereign to the multitude. *Critical Perspectives on Accounting*, 53.

<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.03.005>

Savira, R., Kristiawati, E., & Afif, A. (2022).

Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Kawasan Keraton Istana Surya Negara Di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 2(2), 1–10. www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

Schmitter, P. C., & Lehmbruch, G. (1979).

Trends towards corporatist intermediation.

In (2010) *Hyperpolitics: an interactive dictionary of political science concepts*.

Sukoharsono, E., & Gaffikin, M. (1993).

Power and knowledge in accounting: Some analysis and thoughts on social, political, and economic forces in accounting and

profession in Indonesia (1800-1950s). In Faculty of Commerce-Accounting &

Thompson, K. (2003). Forms of Resistance: Foucault on tactical reversal and self-formation. *Continental Philosophy Review*, 36.

Tyrrall, D., Woodward, D., & Rakhimbekova, A. (2007). The relevance of International Financial Reporting Standards to a developing country: Evidence from Kazakhstan. *International Journal of Accounting*, 42(1).

<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2006.12.004>

Zeff, S. A. (2012). Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and an Analysis of Trends. *SSRN Electronic Journal*.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.2045708>

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

[Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi \(JAADI\) Vol. 4 No. 1, Hal 1-10, Juni 2024](#)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Membaca Adopsi Standar Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Kuasa dan Pengetahuan Foucault

by Perpustakaan1 UKDC

Submission date: 06-Apr-2026 12:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2923600990

File name: ran_Keuangan_Dalam_Perspektif_Kuasa_Dan_Pengetahuan_Foucault.pdf (274.78K)

Word count: 4578

Character count: 31060

Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)

www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

**MEMBACA ADOPTI STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF KUASA DAN PENGETAHUAN FOUCAULT**

Yohanes Febiyol Halan*

Jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail : Yohaneshalan01@gmail.com

ABSTRACT

The adoption of financial reporting standards is approached in a different way in this research. The objective is to comprehend and clarify the adoption of financial reporting standards from the perspective of the power held by standard-setting bodies. The power they possess is connected to their knowledge. The researcher uses Foucault's power-knowledge relational perspective as the research method. The findings demonstrate a strong connection between power and knowledge when it comes to adopting financial reporting standards. Standard-setting bodies use their knowledge to exert power. Internalizing power in financial reporting standards leads to knowledge. Standard-setters have a non-oppressive and omnipresent power. This research is expected to provide a novel understanding of the adoption of financial reporting standards from the perspective of power-knowledge relations.

Keywords: Financial reporting standards, power-knowledge relations

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda terkait adopsi standar pelaporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan adopsi standar pelaporan keuangan dari sudut pandang kuasa yang dimiliki oleh badan pembuat standar. Kuasa ini dikaitkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Peneliti menggunakan perspektif relasi kuasa-pengetahuan Foucault sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan kuatnya relasi kuasa-pengetahuan dalam adopsi standar pelaporan keuangan. Badan pembuat standar pelaporan keuangan menggunakan pengetahuannya untuk menghasilkan kuasa. Kuasa yang diinternalisasi dalam standar pelaporan keuangan menghasilkan pengetahuan. Kuasa yang dimiliki oleh pembuat standar adalah kuasa tanpa penindasan. Kuasa ini juga ada dimana-mana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait adopsi standar pelaporan keuangan dari perspektif relasi kuasa-pengetahuan

Kata Kunci: Standar pelaporan keuangan, relasi kuasa-pengetahuan

PENDAHULUAN

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB), standar akuntansi merupakan suatu metode untuk penyeragaman penyajian informasi keuangan. Lebih lanjut FASB menyatakan bahwa standar akuntansi meliputi kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dari berbagai perusahaan dapat dibandingkan (Endrawes et al., 2020). Definisi ini secara tegas menganjurkan keseragaman lintas batas mengingat perusahaan multinasional dapat beroperasi pada beberapa negara. Para pihak yang berkepentingan membutuhkan standar yang sama agar dapat memahami dan membandingkan kondisi perusahaan yang berada pada lintas negara. Adopsi standar pelaporan keuangan internasional, selanjutnya disebut standar pelaporan keuangan, dianggap jalan untuk mencapai tujuan ini. Adopsi standar pelaporan keuangan dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses penyeragaman budaya mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Pemaknaan ini memantik pertanyaan lebih lanjut terkait seberapa penting penyeragaman ini, mengingat ada proses memasukan budaya kerja baru dalam masyarakat industri di suatu negara. Argumentasi para pihak yang mendukung proses

adopsi standar akuntansi adalah penciptaan harmonisasi global atas rasionalitas ekonomi agar menghasilkan keterbukaan dan tanggung jawab (Lehman, 2005). Pandangan ini mengandaikan adanya kesamaan struktur sosial budaya sehingga dapat secara seragam bereaksi terhadap perubahan yang diberikan. Dengan demikian, pembuat standar akan memodifikasi sedemikian rupa standar pelaporan keuangan agar perubahan dapat diterima tanpa penolakan oleh pihak pengguna.

Argumentasi terkait penciptaan keharmonisan global mendapat tanggapan serius dari pihak yang berseberangan. Mereka memandang bahwa propaganda adopsi standar pelaporan keuangan bukan hanya persoalan laporan keuangan namun juga kental dengan unsur politik (Fogarty, 1992; Zeff, 2012)(Fogarty, 1992). Faktor kepentingan, mempertahankan status quo, bahkan memperluas kekuasaan dalam bidang ekonomi dapat menjadi tujuan dari propaganda ini. Beberapa peneliti lain sudah mencoba menginterpretasikan secara kritis terkait persoalan ini dari sudut pandang negara yang pengadopsi. (Gallhofer et al., 2011) dan (Guerreiro et al., 2012) sepakat menginterpretasikan bahwa adopsi standar pelaporan keuangan dimotivasi oleh keinginan untuk mendapat legitimasi dari negara-negara kuat atau organisasi lintas batas. Legitimasi yang diharapkan seperti yang diinterpretasikan oleh (Gallhofer et al., 2011) dan (Guerreiro et al., 2012) mesti diselidiki lagi lebih mendalam terkait para pihak yang berperan mengambil keputusan.

Korporasi adalah salah satu pihak yang berkepentingan dengan penyamaan standar pelaporan keuangan ini. Mereka berkepentingan untuk mendapat legitimasi terkait internasionalisasi untuk menyamakan posisi mereka dengan korporasi di negara lainnya. Penyetaraan ini menjadi penting untuk meningkatkan nilai. Namun perlu diingat bahwa kepentingan korporasi harus didukung oleh negara sebagai pemegang otoritas. (Botzem & Quack, 2006) memberi catatan bahwa standar akuntansi beroperasi dengan cara yang serupa, baik dalam sistem yang diatur secara privat maupun dalam sistem yang diatur secara publik. Negara pada satu sisi dapat secara tegas memberikan batasan atas masuknya sebuah standar yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya yang dianut. Namun negara juga dapat mempertimbangkan faktor ekonomi berupa investasi yang akan masuk jika adanya penyamaan standar pelaporan keuangan. Pertimbangan terkait pengurangan beban dalam membuat standar sendiri juga dapat digunakan untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan. (Schmitter & Lehbruch, 1979) dan (Fligstein et al., 1983) berpendapat bahwa pemberian akses kepada kelompok-kelompok kepentingan dalam membuat kebijakan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah.

Badan pembuat standar pelaporan keuangan internasional, selanjutnya disebut badan pembuat standar, adalah badan profesional dalam bidang standar akuntansi keuangan yang juga berkepentingan atas penyamaan standar. (Arnold, 2005) dan (Gallhofer et al., 2011) memberikan catatan penting bahwa firma audit besar adalah aktor kunci dalam kaitannya dengan harmonisasi standar pelaporan keuangan karena mereka yang mengendalikan profesi. Ada tiga pihak yang dapat disebut sebagai yang berkepentingan terhadap adopsi pelaporan keuangan yaitu korporasi, negara, profesional. Kerja sama tiga pihak ini menjadi penting untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian seperti yang diharapkan oleh pihak yang menyetujui penyeragaman standar. Dalam prakteknya, tidak semua negara pengadopsi dapat mengimplementasikan standar internasional secara baik. (Tyrrell et al., 2007) mencatat bahwa negara yang akibat tekanan untuk mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) tidak dapat menerapkannya secara patuh. Hal ini terjadi karena ada variabel di luar standar yang dapat mempengaruhi akuntansi. Sosial budaya dan ideologi dapat menjadi faktor di luar standar yang mempengaruhi adopsi standar pelaporan keuangan di suatu negara. Kondisi seperti ini menjadi perhatian dari para pihak yang kontra terhadap penyeragaman standar pelaporan keuangan.

Perlu dipahami bahwa dalam hubungan antara ketiga pihak di atas, pihak profesional pembuat standar adalah yang berperan penting dalam menghasilkan standar. Standar yang dihasilkan mesti diformulasikan sedemikian rupa agar dapat dipahami dengan cara yang sama oleh semua negara yang mengadopsi. Selain itu, untuk menghindari kesalahan penafsiran yang dapat berakibat pada kesalahan penerapan hingga penolakan, pembuat standar menggunakan istilah-istilah yang tidak multi tafsir dan melengkapinya dengan contoh-contoh yang relevan. Dengan demikian, standar pelaporan yang dihasilkan merupakan dokumen instruksi yang diharapkan akan digunakan secara taat oleh para pengguna tanpa perlawanan yang berarti. Pembuat standar pada posisi ini dapat memaksa negara pengadopsi untuk menggunakan standar tanpa harus berkuasa atas negara pengadopsi. Mereka dapat mengontrol aktivitas keuangan negara pengadopsi menggunakan bahasa pelaporan yang mereka siapkan tanpa harus menguasai negara pengadopsi (Savira et al., 2022). Mereka bisa melakukan ini karena mereka memiliki pengetahuan dalam menyusun standar pelaporan keuangan. Oleh karena itu maka penting untuk menjelaskan lebih dalam secara konseptual teoretis tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam hubungannya dengan standar pelaporan keuangan. Artikel ini akan menggunakan perspektif kuasa-pengetahuan Foucault untuk menjelaskan adopsi standar pelaporan keuangan.

Ada sejumlah penelitian sebelumnya terkait pengadopsian standar pelaporan keuangan. (Lehman, 2005) mengkritik pendekatan modernitas yang terlalu fokus pada keuntungan perusahaan dan tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan global yang dihasilkan oleh harmonisasi akuntansi internasional. (Aburous, 2019) berpendapat bahwa implementasi IFRS telah menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara akuntansi perusahaan dan audit, dengan audit mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan kontrol atas perusahaan. (Cieslewicz, 2014) menyatakan bahwa faktor budaya dan institusional memainkan peran penting dalam membentuk praktik akuntansi di berbagai negara. (Laaksonen, 2022) menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan kekuasaan dalam proses terjemahan dan menunjukkan bahwa terjemahan dapat mengungkap ketimpangan dan hegemoni antar budaya. Penelitian oleh (Albu et al., 2014) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti budaya lokal, institusi, dan kepentingan aktor-aktor lokal dapat mempengaruhi penerjemahan dan penerapan standar akuntansi global. Hasil penelitian di atas memberikan gambaran adanya sejumlah akibat lain yang muncul sebagai konsekuensi logis adopsi standar pelaporan keuangan. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan adopsi standar pelaporan keuangan dari sudut pandang kuasa yang dimiliki oleh badan pembuat standar.

TINJAUAN PUSTAKA

Relasi Strategis

Kekuasaan sebagai relasi strategis memunculkan enam pokok pikiran seperti yang disarikan oleh (Kebung, 2018) sebagai berikut. Pertama, Kuasa pada dasarnya timbul dari hubungan antara berbagai kekuatan. Kuasa yang mutlak dan a priori, tidak tergantung pada kesadaran manusia. Bukan milik yang dapat diperoleh, dipindahkan, atau diubah, telah ada dalam praktik sebelum dimengerti sebagai kekuasaan antar manusia. Kedua, Kuasa ini tersebar di seluruh tempat dan tidak dapat diidentifikasi lokasinya. Di setiap struktur dan relasi antar manusia, terdapat kuasa yang menentukan aturan internal, tidak bergantung pada sumber eksternal. Ketiga, Kuasa dipahami sebagai mekanisme atau strategi yang menekankan fungsi dalam bidang tertentu. Kuasa diimplementasikan dalam posisi yang saling terhubung secara strategis, membawa potensi strategi perjuangan tanpa tumpang tindih atau kekacauan. Keempat, Kuasa dan pengetahuan saling terkait secara erat dalam interaksi kompleks dan saling mempengaruhi. Pengetahuan lahir dari relasi

kuasa, sementara kuasa juga dapat dianggap sebagai bentuk pengetahuan. Keduanya saling terkait. Kelima, Bentuk kuasa umumnya berasal dari tingkat bawah masyarakat dan pada dasarnya tidak bersifat represif. Meskipun unsur-unsur ini hadir dalam hubungan antarmanusia, hakikat kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa beroperasi melalui regulasi dan normalisasi. Keenam, Di setiap keberadaan kuasa, selalu timbul resistensi. Resistensi dalam relasi kuasa menurut Foucault tidak selalu sebagai posisi eksterior, melainkan sebagai reaksi dengan nuansa kebebasan dan saling menerima.

Episteme

Foucault awalnya memfokuskan perhatiannya pada sejarah pengetahuan, terutama *epistem*. *Epistem* merupakan pengetahuan yang sudah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman. *Epistem* dipahami dalam rana yang praktis. Melalui *episteme*, kita dapat memahami cara strategi kekuasaan beroperasi dalam domain pengetahuan. Foucault mengungkap mitos pengetahuan melalui dua pendekatan, yaitu metode arkeologi dan genealogi. Foucault mengartikan arkeologi sebagai penyelidikan kondisi sejarah konkret, di mana pernyataan digabungkan membentuk dan mendefinisikan bidang pengetahuan terpisah, memerlukan seperangkat konsep tertentu. Arkeologi, menurut Foucault, menyoroti peninggalan masa lalu di lokasi tertentu dan menelusuri jejak ritus atau monumen diskursif. Terkait genealogi, Foucault tidak bermaksud menggunakannya untuk menelusuri asal-usul, dan tidak berniat untuk kembali ke masa lalu untuk mengisi kelanjutan yang tak pernah berakhir. Foucault berusaha menyelami setiap tema dalam setiap periode, menggunakan tema tersebut sebagai alat analisis terhadap sistem pengetahuan yang dihasilkan oleh berbagai wacana praktis pada waktu itu (Flew, 2015). (Kendall & Wickham, 2011) menyarankan ada lima tahap kunci dalam menerapkan paradigma Foucauldian, termasuk: memahami bahwa wacana adalah kumpulan pernyataan yang diorganisir secara teratur dan sistematis dalam korpus linguistik; mengenali norma-norma yang menghasilkan pengetahuan; Mencari aturan-aturan yang menetapkan pembatasan-pembatasan; mencari aturan-aturan yang memberikan peluang bagi kemunculan pengetahuan yang baru; mencari norma-norma yang memastikan bahwa praktik pengetahuan bersifat baik material maupun diskursif secara simultan.

Governmentality

Foucault menggambarkan *governmentality* sebagai serangkaian praktik yang memungkinkan seseorang untuk membentuk, mendefinisikan, mengorganisir dan menginstrumentalkan strategi-strategi yang digunakan oleh individu dalam interaksi satu sama lain. (McKinlay & Pezet, 2018). Ini menunjukkan bahwa konsep *governmentality* tidak hanya berlaku untuk negara, tetapi juga mencakup semua institusi yang mengatur kehidupan sosial, termasuk perusahaan. *Governmentality* memiliki tiga prinsip (McKinlay & Pezet, 2018). Pertama, prinsip dasar *governmentality* adalah strategi yang memberikan solusi pragmatis untuk masalah tertentu, meskipun masalah tersebut sulit diatasi. Kedua, Strategi yang dianggap sah adalah strategi yang dapat dipertanggungjawabkan karena berkontribusi pada perluasan kebebasan individu. Ketiga, Karakteristik unik dari strategi-strategi tersebut adalah kemampuan mereka untuk menetapkan, mengawasi, dan menilai suatu populasi dengan tujuan mengidentifikasi serta mengincar individu-individu tertentu untuk diintervensi.

Governmentality menekankan pengelolaan perilaku dari jauh atau tanpa intervensi langsung. Seni memerintah tidak terikat pada lingkup negara, melainkan dapat ditemukan di berbagai tempat di mana kekuasaan berusaha mengelola perilaku, walaupun melibatkan cara yang tidak langsung (Thompson, 2003). (Lash, 2007) membahasakan *governmentality* sebagai cara Foucault menjelaskan post-hegemonik. Pergeseran kekuasaan dari hegemonik ke post-hegemonik melibatkan perubahan dari rezim

epistemologis ke model ontologis, dari kekuasaan terhadap (*power over*) ke kekuasaan dari dalam (*power from within*). Foucault mengutamakan penggunaan analisis diskursus untuk menemukan dan memahami kekuasaan yang terselubung di dalam konstruksi pengetahuan (Bisman, 2011; Carnegie, 2014)(Carnegie, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dengan teknik studi literatur sesuai realitas sosial yang terjadi. Fokus utama dalam artikel ini adalah mengenai keterkaitan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam kaitannya dengan adopsi standar pelaporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggali pemikiran para ahli, yang ide-ide mereka terdokumentasikan dalam berbagai buku, artikel, dokumen, dan sumber lainnya, terutama terkait dengan penerapan standar pelaporan keuangan dilihat dari perspektif kekuasaan dan pengetahuan. Peneliti menggunakan pokok pemikiran Foucault tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan sebagai teknik analisis data. Foucault meneliti hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang pada akhirnya menjadi inti dari teorinya. Foucault memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang berbeda dari perspektif Marxian atau Weberian. Baginya, kekuasaan bukan kepemilikan, melainkan hubungan kompleks dan terdistribusi dalam masyarakat. Kekuasaan bukanlah sekadar mekanisme dominasi yang termanifestasi dalam relasi konvensional antara yang mendominasi dan yang didominasi, atau antara yang berkuasa dan yang tanpa kekuasaan. (Sukoharsono & Gaffikin, 1993) menjelaskan bahwa menerapkan pendekatan filosofis Foucauldian dalam penelitian sejarah akuntansi disebut sebagai paradigma postmodern, di mana studi sejarah akuntansi dilakukan dengan menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Michael Foucault. Pada dasarnya ada dua paradigma utama yang digunakan dalam penelitian terkait akuntansi (Carmona et al., 2004) yaitu *traditional accounting history* dan *new accounting history*. Paradigma pertama merupakan paradigma *mainstream* dalam studi akuntansi. Sedangkan paradigma kedua adalah pendekatan alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adopsi Standar Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Kuasa Dan Pengetahuan Foucault

Argumentasi utama pentingnya standar akuntansi internasional adalah penerapan prinsip rasionalitas ekonomi yang bertujuan mencapai harmonisasi global, menciptakan peluang finansial dan politik yang saling menguntungkan dalam konteks tatanan dunia terbuka. Argumentasi ini seperti memberi harapan baru akan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh politik mulia yang dapat diperoleh dari adopsi standar pelaporan keuangan. Pihak yang mendukung cara pandang ini melihat tidak terhindarnya globalisasi. Globalisasi berdampak pada guncangan ekonomi, maka dibutuhkan alat yang menyeimbangkan yaitu pasar dengan hambatan minimal. Standar pelaporan keuangan yang berlaku global menjadi alat yang dapat menyeimbangkan pasar. Argumentasi ini seperti menciptakan masalah dan mencari solusi atas masalah yang mereka buat. Istilah globalisasi diciptakan secara sebagai sebuah peluang dan sekaligus masalah. Pada saat bersamaan mereka menghadirkan standar pelaporan keuangan sebagai cara untuk menangkap peluang sekaligus memitigasi masalah. Argumentasi ini mendefinisikan permasalahan sebagai sesuatu yang berlaku global sekaligus memberikan solusi global. Hal ini serentak menutup potensi lokal untuk menyelesaikan persoalan mereka. Argumentasi standar pelaporan keuangan sebagai alat menciptakan kesejahteraan, menimbulkan pertanyaan terkait pihak-pihak mana yang akan memperoleh kesejahteraan. Jika standar pelaporan lokal keuangan dari sebuah negara diabaikan maka akan sangat

sulit memaknai bahwa kesejahteraan akan diperoleh oleh masyarakat lokal melalui standar pelaporan yang dibuat oleh badan internasional.

Situasi awal tahun 1980-an berperan penting dalam munculnya Foucault sebagai sumber utama dalam sejarah akuntansi kritis (Carter, 2008). Terhadap akuntansi, studi Foucauldian berpendapat bahwa teknik akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat, melainkan juga membentuk cara pandang terhadap dunia, khususnya dalam penghitungan individu dan perilaku tertentu (McKinlay & Pezet, 2010). Hal ini memberikan gambaran bahwa akuntansi dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol. Untuk menjadikan akuntansi sebagai alat, perlu adanya standar yang memaksa pihak lain untuk patuh. Para pembuat standar adalah pihak yang paling berkepentingan dalam memaksakan pihak lain. Kondisi ini memenuhi definisi kekuasaan dan pengetahuan Foucault.

Akuntansi merupakan sebuah konsep yang dibakukan dalam sebuah standar. Standar mengandung pernyataan-pernyataan yang yang diorganisasikan secara teratur dan sistematis. Hal ini dimungkinkan karena akuntansi mempunyai sifat-sifat dasar seperti *Accounting Entity, Going Concern, Measurement, Time Period, Monetary Unit, Accrual, Exchange Price, Measurement, Approximation, Judgment, General Purpose, Interrelated Statement, Substance Over Form, Materiality*. Berdasarkan pada sifat dasar ini maka akuntansi dapat dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan tentang akuntansi mulai dibangun dengan menyusun kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam menghasilkan setiap butir standar. Kerangka konseptual merupakan sistem koheren yang menghubungkan tujuan dan prinsip, memandu pembentukan standar konsisten, menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan serta laporan keuangan.

Setiap standar yang dihasilkan secara tegas memberikan batasan-batasan. Batasan-batasan ini jelas ada dalam struktur penulisan standar yang dimulai dengan menjelaskan tujuan, menjelaskan ruang lingkup, dan memberikan definisi-definisi sebelum masuk pada penjelasan pokok. Setiap standar merupakan aturan-aturan yang membuka ruang bagi pengetahuan baru. Standar akuntansi selain berupa aturan-aturan yang dibangun untuk menjelaskan sebuah konsep, juga sekaligus merupakan konsep baru. Hal ini berarti bahwa standar akuntansi itu adalah bentuk praktis dari konsep dan sekaligus dapat menghasilkan interpretasi baru yang aturan tersebut. Dengan kata lain standar akuntansi merupakan aturan-aturan yang menjamin bahwa praktik pengetahuan bersifat material dan diskursif secara bersamaan.

Mendesentralisasikan analisis kekuasaan dan menolak model pemusatan kekuasaan

Kuasa menurut Foucault tersebar di seluruh tempat. Ketika sebuah perusahaan mengadopsi standar pelaporan keuangan maka pada saat bersamaan mereka berada dalam kuasa pembuat standar. Kuasa yang dimiliki oleh pembuat standar ada di mana-mana dan siap untuk menguasai siapa saja yang menggunakan standar pelaporan keuangan. Foucault menjelaskan bahwa kuasa dapat bekerja pada tubuh yang patuh. Tubuh yang patuh ini ditundukan, ditransformasi agar kuasa dapat bekerja. Pada kasus penyeragaman standar pelaporan keuangan, pembuat standar pelaporan keuangan mengkondisikan semua negara pengadopsi sedemikian rupa agar dapat mengimplementasikan standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga mencapai kondisi optimal. Fokus utama Foucault pada proses ini bukan pada hasilnya tapi pada prosesnya. Hal ini terjadi pada proses adopsi IFRS seperti yang terjadi di Indonesia. Dilakukan dalam beberapa tahapan sambil mempersiapkan infrastrukturnya. Proses yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara pengadopsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa itu dapat terjadi secara bersamaan di beberapa tempat sekaligus. Ini yang disebut sebagai kekuasaan yang terdesentralisasi.

Melihat kekuasaan secara eksternal.

Kekuasaan dalam pandangan Foucault harus dilihat dari sumber kekuasaan itu muncul. Pada kasus adopsi standar pelaporan keuangan, kekuasaan tidak datang dalam bentuk kekuatan namun dalam bentuk gagasan. Maka perlu untuk memahami bagaimana cara kerja lembaga pembuat standar pelaporan keuangan. Lembaga ini tidak mempunyai lokasi teritorial seperti sebuah negara. Kekuasaan bukanlah *sovereign power* tetapi *disciplinary power*. Maka lokasi kekuasaan bukan berupa tempat tapi berupa hubungan yang terafiliasi antara lembaga pembuat standar dan pengadopsi standar pelaporan keuangan.

Kekuasaan bukan sebagai komoditas.

Foucault melihat kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan (*forces*). Dalam kaitannya dengan standar pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa terbentuknya *International Accounting Standards Committee* (IASC) yang kemudian menjadi *The International Accounting Standards Board* (IASB) merupakan hasil relasi pihak-pihak yang berkepentingan. Berkembangnya perdagangan internasional dan investasi lintas batas mendorong pihak-pihak berkepentingan untuk merumuskan standar yang dapat dipahami bersama. Standar merupakan alat untuk mengatur perilaku berdasarkan definisi yang dituliskan dalam standar tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan yang tegas sekaligus menyamakan persepsi sehingga mengurangi interpretasi kontraproduktif.

Kekuasaan bekerja dari bawah ke atas.

Kekuasaan dimulai dari konsepsi atau gagasan yang berasal dari situasi yang berskala kecil, dan kemudian berkembang menjadi keputusan dan tindakan yang lebih besar. Kekuasaan dalam pengertian ini tidak dipaksakan oleh otoritas seperti negara. Kekuasaan dalam kaitannya dengan adopsi standar pelaporan keuangan, ide pembuatan standar muncul dari kalangan profesional dalam usaha untuk mengakomodir kepentingan pemilik modal. Ide ini ditangkap oleh pihak-pihak berkepentingan dan dalam perkembangannya dibutuhkan peran negara. Kesepakatan dalam pertemuan negara-negara G-20 adalah bukti nyata perubahan bentuk ide dari bawah menjadi kekuasaan.

Kekuasaan dimulai dari mekanisme dan praktik-praktik, bukan ideologi

IASB sebagai badan yang menghasilkan IFRS. Pengetahuan yang mereka miliki dapat mewajibkan pengadopsi menjalankan standar yang dibuat. Pengetahuan terbentuk melalui pengaruh kuasa, sementara pengetahuan itu sendiri menjadi sumber dari kuasa. Standar pelaporan keuangan merupakan sumber pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh pembuat standar memproduksi kuasa melalui standar. Pengetahuan ini bukan merupakan suatu ilmu yang berguna bagi masyarakat banyak tetapi merupakan bentuk otoritatif. Bentuknya yang otoritatif mengubah perilaku para pengadopsi standar pelaporan keuangan sesuai dengan keinginan pembuat standar. Kekuasaan ini tidak dalam pengertian represif. Kekuasaan ini dipandang sebagai sesuatu yang natural karena tidak ada penindasan dalam menggunakan IFRS. Negara-negara pengadopsi melihat standar pelaporan keuangan sebagai suatu kebutuhan sehingga perlu untuk segera dilakukan. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia. Sebagai tanggapan atas kesepakatan negara-negara G-20 pada tahun 2009, lembaga pembuat standar secara bertahap melakukan penyesuaian pada standar lokal menuju IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terjadinya normalisasi untuk menerima standar internasional sebagai suatu kebenaran. Pada saat bersamaan negara pengadopsi menjadi objek yang dikuasai oleh lembaga pembuat standar pelaporan keuangan. Pengetahuan yang ditawarkan oleh pembuat standar pelaporan keuangan adalah pengetahuan yang dalam istilahnya Foucault disebut *epistem*. Pengetahuan dalam konteks ini sudah tidak dipahami sebagai sesuatu yang benar atau salah. Pengetahuan ini dipahami dari sudut pandang kepraktisan yaitu apakah dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Lembaga pembuat standar berhak membuat standar berdasarkan

prinsip-prinsip yang mereka anggap benar dalam pengertian dapat diterapkan di semua negara pengadopsi. Oleh karena itu maka kebenaran dalam standar pelaporan keuangan merupakan hasil dari relasi kekuasaan yang terinternalisasi dalam diri pembuat standar. Kebenaran dalam standar pelaporan keuangan adalah kebenaran yang akan berubah ketika terjadi perubahan kepentingan para pihak terkait.

PENUTUP

Akuntansi pada dasarnya adalah alat untuk menguasai sebagaimana Foucault mendefinisikan kekuasaan. Dalam perkembangan sejarahnya pun akuntansi menjadi alat menguasai. Ketika akuntansi diatur secara ketat dalam sebuah standar, peran akuntansi sebagai alat kekuasaan menjadi sangat jelas. Maka ketika ketika akuntansi digunakan dengan cara yang sama oleh pengguna, wilayah kekuasaan akuntansi menggapai sampai ke penjuru dunia. Namun, adopsi standar pelaporan keuangan yang didasarkan pada pemikiran bahwa dibutuhkan keseragaman dalam dunia global untuk menciptakan keuntungan bagi semua pihak mendapat tanggapan beragam. (Aburous, 2019) memberikan dua asumsi dasar akuntansi. Pertama, Akuntansi adalah bentuk institusi, suatu sistem pemikiran, dan rutinitas organisasional yang melibatkan aktor dan kekuasaan. Kedua, Akuntansi perusahaan dianggap sebagai suatu ranah institusional yang memiliki sistem pengetahuan khusus, peran-peran yang terdefinisi, dan keyakinan bersama. Asumsi dasar ini memberikan pemahaman bahwa akuntansi merupakan bentuk kekuasaan yang digunakan oleh para aktor di dalamnya. Maka penyamaan standar pelaporan keuangan merupakan kemauan para aktor yang hendak berkuasa. Lembaga pembuat standar memproduksi kekuasaan melalui standar yang dihasilkan dan menawarkan kepada kepada pengadopsi sebagai 'solusi' menciptakan kesejahteraan bersama. Menggunakan pengetahuan, mereka menciptakan kekuasaan. Pada saat bersamaan melalui kekuasaan mereka menciptakan pengetahuan berupa standar baru pelaporan keuangan. Melalui standar pelaporan keuangan mereka berperan seperti kamera pengawas. Kekuasaan yang diproduksi oleh lembaga pembuat standar pelaporan keuangan tidak represif sehingga tidak menimbulkan resistensi yang berarti. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa relasi kuasa-pengetahuan yang diperankan oleh lembaga pembuat standar pelaporan keuangan ini akan terus berjalan sampai ditemukan relasi kuasa pengetahuan baru yang dapat membatalkan relasi kuasa pengetahuan yang sedang berjalan ini. Kelima terakhir ini mau mengatakan bahwa relasi kuasa-pengetahuan tidak akan hilang namun hanya berganti bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburous, D. (2019). IFRS and institutional work in the accounting domain. *Critical Perspectives on Accounting*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.10.001>
- Albu, C. N., Albu, N., & Alexander, D. (2014). When global accounting standards meet the local context-Insights from an emerging economy. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(6). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.005>
- Arnold, P. J. (2005). Disciplining domestic regulation: The World Trade Organization and the market for professional services. *Accounting, Organizations and Society*, 30(4). <https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.04.001>
- Bisman, J. (2011). Old fossils and accounting history. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 24(7). <https://doi.org/10.1108/09513571111161657>

- Botzem, S., & Quack, S. (2006). Contested rules and shifting boundaries: International standard-setting in accounting. In *Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511488665.014>
- Carmona, S., Ezzamel, M., & Gutiérrez, F. (2004). Accounting history research: traditional and new accounting history perspectives. *De Computis, 1*.
- Carnegie, G. D. (2014). The present and future of accounting history. *Accounting, Auditing and Accountability Journal, 27*(8). <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2014-1715>
- Carter, C. (2008). A Curiously British Story: Foucault Goes to Business School. *International Studies of Management & Organization, 38*(1). <https://doi.org/10.2753/im0020-8825380101>
- Cieslewicz, J. K. (2014). Relationships between national economic culture, institutions, and accounting: Implications for IFRS. *Critical Perspectives on Accounting, 25*(6). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.006>
- Endrawes, M., Feng, Z., Lu, M., & Shan, Y. (2020). Audit committee characteristics and financial statement comparability. *Accounting and Finance, 60*(3). <https://doi.org/10.1111/acfi.12354>
- Flew, T. (2015). Foucault, Weber, Neoliberalism and the Politics of Governmentality. *Theory, Culture & Society, 32*(8). <https://doi.org/10.1177/0263276415607605>
- Fligstein, N., Lehmbruch, G., & Schmitter, P. C. (1983). Patterns of Corporatist Policy-Making. *Contemporary Sociology, 12*(5). <https://doi.org/10.2307/2068745>
- Fogarty, T. J. (1992). Financial accounting standard setting as an institutionalized action field: Constraints, opportunities and dilemmas. *Journal of Accounting and Public Policy, 11*(4). [https://doi.org/10.1016/0278-4254\(92\)90003-G](https://doi.org/10.1016/0278-4254(92)90003-G)
- Gallhofer, S., Haslam, J., & Kamla, R. (2011). The accountancy profession and the ambiguities of globalisation in a post-colonial, Middle Eastern and Islamic context: Perceptions of accountants in Syria. *Critical Perspectives on Accounting, 22*(4). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.09.003>
- Guerreiro, M. S., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2012). Voluntary adoption of International Financial Reporting Standards by large unlisted companies in Portugal - Institutional logics and strategic responses. *Accounting, Organizations and Society, 37*(7). <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.05.003>
- Kebung, K. (2018). Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia. *MELINTAS, 33*(1). <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Kendall, G., & Wickham, G. (2011). Using Foucault's Methods. In *Using Foucault's Methods*. <https://doi.org/10.4135/9780857020239>
- Laaksonen, J. (2022). Translation, hegemony and accounting: A critical research framework with an illustration from the IFRS context. *Critical Perspectives on Accounting, 89*. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102352>

- Lash, S. (2007). Power after Hegemony: Cultural Studies in Mutation? *Theory, Culture & Society*, 24(3). <https://doi.org/10.1177/0263276407075956>
- Lehman, G. (2005). A critical perspective on the harmonisation of accounting in a globalising world. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(7). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.06.004>
- McKinlay, A., & Pezet, E. (2010). Accounting for Foucault. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(6). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.08.006>
- McKinlay, A., & Pezet, E. (2018). Foucault, governmentality, strategy: From the ear of the sovereign to the multitude. *Critical Perspectives on Accounting*, 53. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.03.005>
- Savira, R., Kristiawati, E., & Afif, A. (2022). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Kawasan Keraton Istana Surya Negara Di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 2(2), 1–10. www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id
- Schmitter, P. C., & Lehmbruch, G. (1979). Trends towards corporatist intermediation. In (2010) *Hyperpolitics: an interactive dictionary of political science concepts*.
- Sukoharsono, E., & Gaffikin, M. (1993). Power and knowledge in accounting: Some analysis and thoughts on social, political, and economic forces in accounting and profession in Indonesia (1800-1950s). In *Faculty of Commerce-Accounting & ...*
- Thompson, K. (2003). Forms of Resistance: Foucault on tactical reversal and self-formation. *Continental Philosophy Review*, 36.
- Tyrrall, D., Woodward, D., & Rakhimbekova, A. (2007). The relevance of International Financial Reporting Standards to a developing country: Evidence from Kazakhstan. *International Journal of Accounting*, 42(1). <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2006.12.004>
- Zeff, S. A. (2012). Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and an Analysis of Trends. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2045708>